

ABSTRAK

Nama : NYODI HANDOKO (NIM: 1410511020)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : “Formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2019)”

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan RKP Desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Teori utama yang digunakan adalah Teori Formulasi Kebijakan Elite dan Teori Partisipasi Arnstein. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1) Proses penyusunan RKP Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formal maupun secara substansial. Secara formal, ketidaksesuaian itu dapat disimpulkan dari: (a) Penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan, tetapi Kepala Desa langsung menetapkan Tim Penyusun RKP Desa; (b) Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa hanya berdasarkan pencermatan RPJM Desa, pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Program Pembangunan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk desa, minus (-) hasil musyawarah desa.

Secara substansial, program-program RKP Desa kurang mengakomodir usulan dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan (kurang beruntung). Kesimpulan ini ditunjukkan dari data dan informasi: (1) Penyusuna rancangan RKP bersifat *bottom up* dan *top down* dari pencermatan dan penyesuaian dengan RPJM Desa, Program Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk Desa dan Pagu Indikatif Desa, penggalan kebutuhan dan usulan dari masyarakat tidak berjalan efektif; (2) Pemerintah Desa memiliki persepsi bahwa mereka mengetahui betul kebutuhan masyarakat, sehingga merasa perlu melakukan penggalan gagasan dan kebutuhan masyarakat. Jikalau penggalan gagasan dan usulan dari tingkat RT, lebih dimaknai sekedar menjalankan prosedur atau perintah atasan. Dilihat dari model formulasi kebijakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Puger Kulon pada kenyataannya lebih mendekati formulasi kebijakan model elite. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh UU Desa masih jauh dari harapan. Tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat informasi, anak tangga ketiga menurut tangga partisipasi **Sherry Phyllis Arnstein**. Semua rencana kerja pemerintah desa sudah ditentukan dari pemerintah desa yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *proses, penyusunan, rencana kerja, Pemerintah Desa, partisipasi.*

ABSTRACT

Name : NYODI HANDOKO (NIM 1410511020)
Study Program : Governmental Science
Title : "Formulation of Village Government Work Planning (Study in Puger Kulon Village, Puger Sub-district of Jember District 2019)"

This study aims to: 1) describe the suitability between the implementation of the preparation of the Village Government Work Plan with the applicable legislation; 2) describe the level of community participation in the preparation of the Village Government Work Plan. The main theories used are Elite Policy Formulation Theory and Arnstein's Theory of Participation. The method used is descriptive qualitative. The results of the study show the following. 1) The process of preparing a Village Government Work Plan has not been in accordance with legislation that applies both formally and substantially. Formally, the discrepancies can be concluded from: (a) Preparation of the Village Government Work Plan begins with the Village Planning Village Consultation, but the Village Head directly assigns the Village Village Work Plan Development Team; (b) The Village RKP Compilation Team in drafting the Village Government Work Plan is only based on the observation of the Village RPJM, observing the Indicative Village Ceiling and the Government / Provincial / District Development Programs that enter the village, minus (-) the results of village meetings.

Substantially, the Village Government Work Plan programs do not accommodate proposals from marginalized (disadvantaged) groups. These conclusions are shown from data and information: (1) The drafters of the Village Government Work Plan are bottom up and top down from scrutiny and adjustments to the Village Medium Term Development Plan, Government / Provincial / District Programs that enter the Village and Indicative Village Ceiling, extracting needs and proposals from the community do not work effectively; (2) The Village Government has a perception that they know the needs of the community well, so they feel the need to explore community ideas and needs. If excavations of ideas and proposals from the RT level are interpreted as merely carrying out procedures or orders from superiors. Judging from the policy formulation model, the preparation of the Village Government Work Plan in Puger Kulon in fact is closer to the elite policy formulation. This resulted in the level of community participation expected by the Village Law still far from expectations. The level of community participation is still at the information level, the third step according to the participation ladder of Sherry Phyllis Arnstein. All village government work plans have been determined from the village government incorporated in the Village Government Work Plan Compilation Team by involving community participation.

Keywords: process, preparation, work plan, village government, participation.